

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 1, Tahun 20120

ISSN 0853-9316

- **PENEGAKAN HUKUM KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL: PEMBELAJARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019**
oleh: Denico Doly
- **REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG**
oleh: Juniar Laraswanda Umagapi
- **PEMANFAATAN FORUM PARIWISATA ASEAN UNTUK PROMOSI PARIWISATA INDONESIA**
oleh: Lisbet
- **SINERGITAS ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMBUATAN PERDA**
oleh: Aryojati Ardipandanto
- **PENCAPAIAN STATUS KESEHATAN IBU DAN BAYI SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK**
oleh: Tri Rini Puji Lestari



**Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI**

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 25, No. 1, Tahun 2020

ISSN 0853-9316

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● PENEGAKAN HUKUM KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL: PEMBELAJARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019 <i>oleh: Denico Doly</i>	1-18
● REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG <i>oleh: Juniar Laraswanda Umagapi</i>	19-34
● PEMANFAATAN FORUM PARIWISATA ASEAN UNTUK PROMOSI PARIWISATA INDONESIA <i>oleh: Lisbet</i>	35-52
● SINERGITAS ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMBUATAN PERDA <i>oleh: Aryojati Ardipandanto</i>	53-73
● PENCAPAIAN STATUS KESEHATAN IBU DAN BAYI SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK <i>oleh: Tri Rini Puji Lestari</i>	57-89

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 25. No. 1 Tahun 2020. Terdapat lima tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan dari penulis internal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul “Penegakan Hukum Kampanye Hitam (*Black Campaign*) di Media Sosial: Pembelajaran Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019”, yang ditulis oleh Denico Doly dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Pemilu tahun 2019 sudah terlewati, tetapi pelaksanaannya menyisakan permasalahan, khususnya kampanye hitam yang beredar di media sosial. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial yaitu, faktor peraturan undang-undang UU No 7 Tahun 2017 yang belum mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, penegak hukum yang kurang personil dan keahlian dalam penegakan hukum kampanye hitam, sarana dan fasilitas yang terbatas, masyarakat yang sudah terbiasa dengan kampanye hitam, dan kebudayaan masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai media sosial. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan preventif dengan literasi media, kerja sama antar lembaga, dan aplikasi pendeteksi dini konten negatif. UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi dengan mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, memperkuat penegak hukum dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penambahan anggaran bagi unit *cyber crime* Polri perlu ditambah untuk fasilitas dan sarana, selain itu literasi media perlu dilakukan dilakukan sejak usia dini.

Artikel kedua adalah tentang “Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan Dan Peluang”, yang ditulis oleh Juniar Laraswanda Umagapi dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Isu tentang keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi padahal meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan.

Tulisan ketiga membahas isu *Workplace Well-Being* dengan judul “Pemanfaatan Forum Pariwisata Asean Untuk Promosi Pariwisata Indonesia”, yang ditulis oleh Lisbet dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. *ASEAN Tourism Forum (ATF)* memiliki peran sangat penting dalam mempromosikan pariwisata karena ATF melibatkan semua pemangku kepentingan sektor pariwisata dari negara anggota ASEAN. Selama ini, ATF telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Upaya ini berhasil karena sektor pariwisata di negara-negara ASEAN maupun di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus. Selain berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di ASEAN, ATF juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan ATF setiap tahunnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang unggul di sisi potensi destinasi wisata budaya dan alam. Selain melakukan upaya promosi pariwisata Indonesia di ATF, Pemerintah perlu mengajak semua pemangku

kepentingan seperti pihak swasta dan masyarakat untuk menata destinasi wisata di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana penunjang pariwisata sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata Indonesia.

Tulisan keempat ditulis oleh Aryojati Ardipandanto dengan judul "Sinergitas Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Pembuatan Perda". DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginformasikan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tidak terakomodasinya aspirasi mereka dalam pembuatan Perda. Sinergitas di antara Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pembuatan Perda masih tidak optimal atau lemah, begitu pula dalam sinergitas dengan Badan Anggaran serta dengan Pemerintah Provinsi, terutama bila dikaitkan dengan prosedur kerja dalam proses pembuatan kebijakan politik atau Perda.

Tulisan yang terakhir berjudul "Pencapaian Status Kesehatan Ibu dan Bayi Sebagai Salah Satu Perwujudan Keberhasilan Program Kesehatan Ibu Dan Anak", yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) selama ini dianggap belum berjalan dengan baik sehingga Indonesia termasuk negara dengan AKI tinggi di Asean. Capaian status kesehatan ibu dan bayi sudah mencapai target nasional, tetapi masih ada beberapa provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional. Faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah ikut memengaruhi keberhasilan program KIA di beberapa provinsi.

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 25, No. 1 Tahun 2020. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, Ph.D, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si, M.A, Dra. Ani Widyani Soetjipto, M.A., Prof. Dr. Achmad Suryana dan Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Juli 2020

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Denico Doly (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENEGAKAN HUKUM KAMPANYE HITAM (BLACK CAMPAIGN) DI MEDIA SOSIAL: PEMBELAJARAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN TAHUN 2019

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hlm. 1-18

Pemilu 2019 sudah terlewati, tetapi pelaksanaannya menyisakan permasalahan, khususnya kampanye hitam yang beredar di media sosial. Media sosial saat ini sudah mengalami perubahan pemanfaatannya, salah satunya yaitu sebagai tempat melakukan kegiatan politik (kampanye). Aturan mengenai kampanye hitam berada pada berbagai peraturan perundang-undangan. Walaupun sudah ada aturan, akan tetapi masih banyak kampanye hitam di media sosial. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu, apa saja faktor yang memengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial dan bagaimana upaya penanggulangan kampanye hitam di media sosial. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum kampanye hitam di media sosial yaitu, faktor peraturan undang-undang UU No. 7 Tahun 2017 yang belum mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, penegak hukum yang kurang personil dan keahlian dalam penegakan hukum kampanye hitam, sarana dan fasilitas yang terbatas, masyarakat yang sudah terbiasa dengan kampanye hitam, dan kebudayaan masyarakat yang belum memahami secara pasti mengenai media sosial. Upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan preventif dengan literasi media, kerja sama antar lembaga, dan aplikasi pendeteksi dini konten negatif. Selain itu upaya represif dilakukan dengan penegakan hukum dan pentupan akun atau situs yang melakukan kampanye hitam. UU No. 7 Tahun 2017 perlu direvisi dengan mengatur secara jelas dan tegas tentang kampanye hitam, memperkuat penegak hukum dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan, penambahan anggaran bagi unit *cyber-crime* Polri perlu ditambah untuk fasilitas dan sarana, selain itu literasi media perlu dilakukan dilakukan sejak usia dini.

Kata kunci: kampanye hitam; media sosial; penegakan hukum.

REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN HASIL PEMILU 2019: TANTANGAN DAN PELUANG

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hlm. 19-34

Penerapan kuota 30% tetap tidak membuat keterwakilan perempuan di parlemen menembus representasi 30% padahal ambang batas parlemen mengalami kenaikan menjadi 4% dan partai politik juga mengikuti aturan kuota dan sistem *zipper*. Isu tentang keterwakilan perempuan menjadi sangat penting karena banyak kebijakan yang dinilai tidak pro terhadap perempuan seperti RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan masih banyak lagi. Meskipun belum mencapai kuota tetapi tahun ini representasi perempuan mengalami kenaikan. Perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah representasi perempuan di politik. Khofifah Indar Parawansa dalam tulisannya tentang hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia menjelaskan bagaimana budaya, proses seleksi partai politik, media, jaringan organisasi yang mempengaruhi keterwakilan perempuan di politik. Ani Widyani Soetjipto juga mendefinisikan secara umum *affirmative action* sebagai tindakan pro-aktif untuk menghilangkan perlakuan diskriminasi terhadap satu kelompok sosial yang masih terbelakang. Penelitian ini mengambil data dari penelitian-penelitian sebelumnya dan juga data yang diolah oleh penulis. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada anggota DPR RI Perempuan agar memberikan gambaran tentang apakah mereka mengalami ketidakadilan pada proses kampanye dan apa dampak terhadap perempuan secara umumnya dari posisi mereka sebagai anggota dewan. Pada akhirnya pertanyaan penelitian yang akan muncul adalah mengapa dengan adanya aturan yang di berlakukan tetapi keterwakilan perempuan masih belum mencapai target dan permasalahan kedua dalam penelitian ini adalah apa peranan anggota legislatif perempuan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan dan pertanyaan terakhir apakah ada dampak dari representasi mereka di pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan meskipun ada kenaikan dalam representasi perempuan di politik tetapi dampak yang signifikan terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan belum terlalu kelihatan terutama para perempuan-perempuan ini belum banyak yang menempati posisi-posisi pimpinan. Partai politik juga memegang peranan yang sangat penting dalam hal menjaring kader perempuan yang berkualitas agar nantinya bisa memberikan perubahan besar untuk isu-isu perempuan. Tujuan penelitian untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi para anggota DPR RI, khususnya alat kelengkapan dewan terkait terutama Komisi VIII dan juga Komisi IX mengenai isu-isu penting yang di hadapi perempuan seperti kesehatan dan ketenagakerjaan.

Kata kunci: kuota 30%; sistem *zipper*; kebijakan pro perempuan; gender; anggota DPR perempuan; komisi VIII; komisi IX

PEMANFAATAN FORUM PARIWISATA ASEAN UNTUK PROMOSI PARIWISATA INDONESIA

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hlm. 35-52

ASEAN Tourism Forum (ATF) memiliki peran sangat penting dalam mempromosikan pariwisata karena ATF melibatkan semua pemangku kepentingan sektor pariwisata dari negara anggota ASEAN. Tulisan ini hendak menganalisis bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan berbagai kegiatan ATF dalam memajukan sektor pariwisata kawasan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada pentingnya peran para pemangku kepentingan di sektor pariwisata, baik *state actor* maupun *non-state actor* serta penjelasan tentang pariwisata dan promosi produk pariwisata. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang berdasarkan pada pedoman wawancara agar mendapatkan data primer. Narasumber pun dipilih secara sengaja. Selain wawancara, kegiatan penelitian ini juga melakukan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan pustaka sehingga diperoleh data-data sekunder. Selama ini, ATF telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di kawasan ASEAN. Upaya ini berhasil karena sektor pariwisata di negara-negara ASEAN maupun di Indonesia mengalami pertumbuhan yang bagus. Selain berupaya untuk meningkatkan sektor pariwisata di ASEAN, ATF juga memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor pariwisata Indonesia melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan ATF setiap tahunnya perlu dimanfaatkan secara optimal untuk semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang unggul di sisi potensi destinasi wisata budaya dan alam. Selain melakukan upaya promosi pariwisata Indonesia di ATF, Pemerintah perlu mengajak semua pemangku kepentingan seperti pihak swasta dan masyarakat untuk menata destinasi wisata di Indonesia yang masih tertinggal dalam hal sarana dan prasarana penunjang pariwisata sehingga dapat meningkatkan sektor pariwisata Indonesia.

Kata kunci: forum pariwisata ASEAN; pariwisata; ASEAN; Indonesia; promosi.

Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

SINERGITAS ALAT KELENGKAPAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PEMBUATAN PERDA

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hlm. 53-73

DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginformasikan bahwa masyarakat sering mengeluhkan tidak terakomodasinya aspirasi mereka dalam pembuatan Peraturan Daerah (Perda). Tulisan ini membahas bagaimana Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi DPRD melakukan sinergitas kinerja dalam pembuatan kebijakan politik atau Perda. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada DPRD tentang bagaimana memperkuat perannya agar dapat lebih efektif dalam menyalurkan keluhan dan atau aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Dari penelitian ini ditemukan bahwa sinergitas diantara Alat Kelengkapan dan Komisi-komisi di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam proses pembuatan Perda masih tidak optimal atau lemah, begitu pula dalam sinergitas dengan Badan Anggaran serta dengan Pemerintah Provinsi, terutama bila dikaitkan dengan prosedur kerja dalam proses pembuatan kebijakan politik atau Perda.

Kata kunci: DPRD; Provinsi Kalimantan Selatan; DPRD Provinsi Kalimantan Selatan; peran politik; kebijakan di daerah; pembuatan kebijakan di daerah.

Tri Rini Puji Lestari (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PENCAPAIAN STATUS KESEHATAN IBU DAN BAYI SEBAGAI SALAH SATU PERWUJUDAN

KEBERHASILAN PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, hlm. 75-89

Ibu dan anak merupakan kelompok yang rentan terkena masalah kesehatan. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) selama ini dianggap belum berjalan dengan baik sehingga Indonesia termasuk Negara dengan AKI tinggi di Asean. Kajian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat studi pustaka. Analisis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kajian ini ditujukan untuk memberikan informasi dan menganalisis terkait capaian dan beberapa faktor yang memengaruhi pencapaian status kesehatan ibu dan bayi, dan harapan ke depan agar lebih baik. Hasil temuan didapat capaian status kesehatan ibu dan bayi sudah mencapai target nasional, tetapi masih ada beberapa provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional. Faktor geografis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta masih rendahnya dukungan pemerintah daerah ikut memengaruhi keberhasilan program KIA di beberapa provinsi.

Kata kunci: status kesehatan; kesehatan ibu dan bayi; kesehatan reproduksi.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Denico Doly (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

LAW ENFORCEMENT OF BLACK CAMPAIGN IN SOCIAL MEDIA: LESSON LEARNED IN THE GENERAL ELECTION OF THE PRESIDENT OF 2019

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, p. 1-18

The 2019 elections have already passed, but the implementation leaves some problems, especially the black campaign on social media. Social media has now undergone a change in its use, one of which is to carry out political activities (campaigns). The rules regarding black attacks are based on various laws and regulations. Even though there are rules, there are still many black campaigns on social media. The problem in this paper is the factors that influences the law enforcement of black attacks on social media and how to overcome black campaigns on social media. Factors influencing black campaign law enforcement on social media are, the law regulation factor Law No. 17 of 2017 which has not clearly and regulated black campaigns, lack of law enforcement personnel and expertise in enforcing black campaign law, facilities and facilities that limited, people who are used to black attacks, and the culture of people who do not understand precisely about social media. Mitigation efforts can be made with preventive media literacy, collaboration between institutions, and early detection applications of harmful content. Besides, repressive efforts carried out by law enforcement and closing accounts or sites that carry out black campaigns. UU no. 7 of 2017 needs to be revised by clearly and decisively regulating black campaigns, strengthening law enforcement through education and training, increasing the budget for police cybercrime units needs to be added for facilities and facilities, besides media literacy needs to be done from an early age.

Keywords: *black campaign; social media; law enforcement.*

WOMEN'S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, p. 19-34

The adoption of a 30% quota hasn't been able to reach 30% women's representation in parliament even though political parties follow the quota and zipper system rules. The issue of women's representation becomes very important because many policies are considered not in favor of women such as the Bill on the Elimination of Sexual Violence should be end here Despite the inability to reach the targeted quota, there has been an increased in women's participation this year. Special attention is needed to the problem of women's representation in politics. Khofifah Indar Parawansa in his writings on obstacles to women's political participation in Indonesia explains how culture, the selection process of political parties, the media, organizational networks that influence women's representation in politics. Ani Widayani Soetjipto also generally defines affirmative action as a proactive action to eliminate discrimination against a social group that still left behind. This study takes data from previous studies and also data processed by the author. To answer the research questions, this study also uses interviews with women of Indonesian Parliament members to provide an overview of whether they experience injustice in the campaign process and what impact on women in general from their positions as members of the legislative. In the end the research question that will emerge is Why the quota system fails to increased women's participation and the second problem in this study is to study the role of women legislators in dealing with policies that not in favor of / beneficial to women issues and the final question is to see whether there are any impact from their representation in government. The results showed that although there was an increase in the representation of women in politics, the significant impact on policies that were in favor of women was not too visible, especially because these women had not occupied many leadership positions. Political parties also play a very important role in recruiting qualified female cadres so that later they can make a big difference to women's issues. The purpose of the research is to provide input and recommendations for members of the Indonesian Parliament, particularly the related complementary organs, especially Commission VIII and also Commission IX on important issues faced by women such as health and employment.

Keywords: quota 30%; zipper system; gender; policies; women's legislative member; commission VIII, commission IX

UTILIZATION OF ASEAN TOURISM FORUM FOR INDONESIA TOURISM PROMOTION

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, p. 35-52

ASEAN Tourism Forum (ATF) had a very important role in promoting tourism in ASEAN because it involved all stakeholders in the tourism industry sector from ASEAN member countries. Therefore, this paper would analyze how Indonesia can utilize various ATF activities in promoting regional tourism to promote Indonesia tourism. The theoretical framework that I used to this paper refers to the important role of stakeholders in the tourism sector, state actor, and non-state actor as well as the explanation of tourism and promotion of tourism products. I used collecting data methods by doing in-depth interviews based on interview guidelines in order to get primary data. The speaker was chosen deliberately. Besides the interview, I used collecting data technic by analyzing the document study and literature so that I could get the secondary data. So far, ATF has made various efforts to improve the tourism sector in the ASEAN region. This effort was successful because the tourism sector in the ASEAN countries and also in Indonesia experienced good growth. Besides trying to improve the tourism sector in ASEAN, ATF also had an important role in improving Indonesia's tourism sector through its activities. Therefore, Indonesia's participation in ATF activities every yearned to be utilized optimally to further strengthen Indonesia's position as a country which has lots of potential for cultural and natural tourism destination. In addition, to promote Indonesian tourism in ATF, the government needs to invite all stakeholders such as the private sector and the community to organize tourism destinations in Indonesia that are still lacking behind, in terms of supporting facilities and infrastructure so that tourism can improve the Indonesian tourism sector.

Keywords: ASEAN tourism forum; tourism; ASEAN; Indonesia; promotion.

Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

THE SYNERGY OF COMPLEMENTARY BODIES OF REGIONAL COUNCIL PROVINCE SOUTH KALIMANTAN IN THE MAKING OF LOCAL REGULATION

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, p. 53-73

South Kalimantan's Regional Council (DPRD) reported that it often occurs people's complaints earlier sent them were found not accommodated in the final deliberations of local regulation making. This article discusses how the Regional Council complimentary bodies or commissions performs synergy in the making of regional provisions or the local regulation. This article is aimed to give recommendations to Regional Council in strengthening its role to more effectively convey people's aspirations and complaints. This research applied a qualitative method using in-depth interviews in its data gathering. It is found that synergy among Regional Council complementary bodies or commissions in the making of local regulation is still in weak condition so as to the cooperations between them and the Budget Council and the Provincial Government's working procedure.

Keywords: *Regional Council; Province South Kalimantan; Regional Council Province South Kalimantan; political role; local policy; local policy making.*

Tri Rini Puji Lestari (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

ACHIEVEMENT OF MOTHER AND BABY HEALTH STATUS AS ONE OF THE SUCCESSES OF MOTHER AND CHILD HEALTH PROGRAMS

Kajian Vol. 25, No. 1, Tahun 2020, p. 75-89

Mother and child are groups that are vulnerable to health problems. The mother and child health program (KIA) has been deemed not going well so that Indonesia is one of the countries with high MMR in ASEAN. This study used qualitative methods that are literature studies. The analysis uses books and other literature as the main object to answer research questions. This study is intended to provide information and analysis related to the achievements and several factors that influence the achievement of the health status of mothers and babies, and future expectations for better. The findings obtained the achievement of the health status of mothers and infants have reached the national target, but there are still some provinces which achievements are below the national achievements. Geographical factors, limited facilities, and infrastructure, as well as the low level of local government support also influence the success of the MCH program in several provinces.

Keywords: *health status; maternal and infant health; reproductive health.*